

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang salah satunya dibuktikan dengan keinginan masyarakat umum untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas publik yang transparan dan akuntabel. Berkembangnya Akuntansi Sektor Publik di Indonesia maka hal yang paling utama dilakukan oleh pemerintahan, yaitu mewujudkan pertanggungjawaban terhadap masyarakat umum dan publik. Pemerintah dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik, seharusnya menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Indrayani & Widiastuti, 2020). Banyak negara memberikan dampak yang sangat signifikan dalam perkembangan akuntansi pada sektor publik contohnya seperti pemerintahan, khususnya di Indonesia sendiri. Untuk itu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi hal yang penting untuk saat ini. Pelayanan dan pertanggungjawaban yang terbaik sekarang menjadi tuntutan bagi pemerintah agar senantiasa tanggap akan lingkungannya. Pemerintah yang berhasil dalam tugasnya yaitu pemerintah yang mencapai tujuan yang telah direncakannya. Dalam mencapai tujuan itu, sumber daya yang ada di pemerintahan tersebutlah yang menjadi upaya pemerintah dalam mencapai tujuannya, salah satu sumber daya tersebut adalah keuangan. Untuk mendorong perkembangan akuntansi sektor publik, sebuah laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan disampaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Pengambilan keputusan diambil dari sebuah laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah oleh para pemangku kepentingan (Mustika & Fadilah, 2020).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu penilaian mengenai baik buruknya laporan atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memiliki kualitas baik dapat dilihat dari opini yang dikeluarkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) selaku badan yang memeriksa dan menilai LKPD. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan setiap satu periode oleh BPK untuk memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Hasil pemeriksaan berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberi Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) (Widiatmoko, 2020).

Pemerintah wajib membuat laporan keuangan untuk mengetahui pengendalian dan evaluasi kerja, sebagai salah satu pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Maka dari itu pemerintah diharuskan membuat laporan keuangan yang berkualitas agar para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) dapat memahami isi yang ada dalam laporan keuangan tersebut. Karena jika laporan keuangan pemerintah buruk dapat menimbulkan implikasi yang negatif, salah satunya yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana publik (pemerintah) dan kualitas keputusan menjadi tidak baik (Abdul, 2018).

Fenomena kualitas laporan keuangan pernah disampaikan IAI bahwa (IAI) menilai, kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia masih rendah. Padahal situasi ini dapat menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi. "Terutama korupsi di sejumlah pemerintahan daerah," kata Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) Pusat, Nunuy Nurafiah di Graha Widyaloka Universitas Brawijaya (UB) Malang, Kamis (3/5).

Menurut Nunuy, IAI sebenarnya sudah menentukan standar kualitas pelaporan keuangan atau akuntansi pemerintah ke dalam lima level. Namun, belum ada pemerintah daerah yang menyentuh level lima atau terbaik. Hingga saat ini, hampir

sebagian besar pemerintahan Indonesia di kabupaten/kota baru bisa mencapai level tiga dan dua. Nunuy menilai, kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memitigasi terjadinya korupsi. Hal ini karena laporan keuangan merupakan bentuk dari transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Untuk itu, pihaknya menginginkan agar transparansi kepada publik semakin kuat dengan pelaporan keuangan. Agar hal itu dapat terwujud, dia berpendapat, peran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditingkatkan dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian auditor didorong untuk selalu memonitor dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan keuangan itu. Dengan demikian, kualitas pelaporan keuangan bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain, dia juga meminta kepada para akuntan untuk aktif melakukan riset. Tujuannya, agar mereka mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pelaporan yang berkualitas. Kemudian hasil riset tersebut dapat diterapkan menjadi dasar regulasi nantinya (Kompas, 2018).

Fenomena yang dijelaskan diatas merupakan salah satu bukti bahwa masih rendahnya kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah yang mengakibatkan timbulnya tindakan korupsi. Laporan keuangan pemerintah daerah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan, hal ini membuat masyarakat menuntut agar penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk menerapkan akuntabilitas publik yaitu melalui suatu media pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dilaksanakan secara periodik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan daerah agar informasi yang diperoleh dapat lebih baik dan berkualitas (Abdul, 2018).

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya adalah sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). SAKD yaitu prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) yang dilakukan secara manual atau memakai aplikasi komputer (Pratama, 2017). SAKD mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan secara sistematis dimulai dari pengklarifikasian, penggolongan pencatatan dan pelaporan. SAKD yang bagus dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, komitmen organisasi juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi merupakan komitmen pegawai untuk bertahan dalam organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut (Widiatmoko, 2020).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) harus memiliki sumber daya manusia manusia yang kompeten, yang didukung dengan pengalaman pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan juga memiliki pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami pengetahuan akuntansi yang baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan pengetahuan akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah. (Tawaqal & Suparno, 2017). Dijelaskan pula bahwa dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah masih terdapat kendala dalam penggunaan SAKD dan penyajian laporan keuangan. Kendala-kendala yang terjadi yaitu terdapat keterlambatan dalam proses pembuatan dan penyampaian laporan keuangan dengan SAKD ke KPPN (Erni et al., 2018). Hal ini dipengaruhi karena masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta masih kurangnya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pengelola keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kompetensi sumber daya manusia dimana seseorang dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik yang mempengaruhi kinerja untuk

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu kualitas laporan keuangan yang baik. Hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan adalah Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah harus memiliki sumber daya yang kompeten. Yang di dukung latar belakang akuntansi. Orang yang memiliki sumber daya manusia yang unggul akan menempatkan posisi Kompetensi yang baik. Berdasarkan pengalaman,pengetahuan dan kinerja yang di dalaminya.kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi seberapa bagus kualitas laporan keuangan daerah. semakin bagus kompetensi sumber daya manusia nya semakin baik pula tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Utama et al., 2017).

Maka dari itu sumber daya manusia adalah seseorang atau individu yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan sistem akan dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian dibidang akuntansi. Kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan berdampak pada laporan keuangan, contohnya seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah dibuat pemerintah, sehingga kualitasnya menjadi tidak baik (Kiranayanti & Erawati, 2016). Artinya semakin baik kapasitas sumber daya manusia semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian dilakukan di kota Bengkulu, sehingga penelitian ini diberi judul : **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.
2. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.
3. Untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Bagi universitas, diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan bukti empiris pada pengembangan ilmu akuntansi keuangan, khususnya mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan. Selain itu juga untuk menambah wawasan ilmu akuntansi dalam laporan keuangan daerah.
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan dan informasi mengenai laporan keuangan daerah serta sebagai alat uji kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh saat perkuliahan dengan praktik nyata.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi para pegawai Dinas Perhubungan yang ada agar menambah pengetahuan tentang laporan keuangan daerah dalam pemerintahan. Sehingga mampu bersaing dengan perkembangan zaman saat ini.